



Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kanwil DJKN Kalimantan Barat



LAPORAN KINERJA

Kanwil DJKN Kalimantan Barat



2024



www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar



Jl. Letjen Sutoyo No. 122 Pontianak



DAFTAR ISI

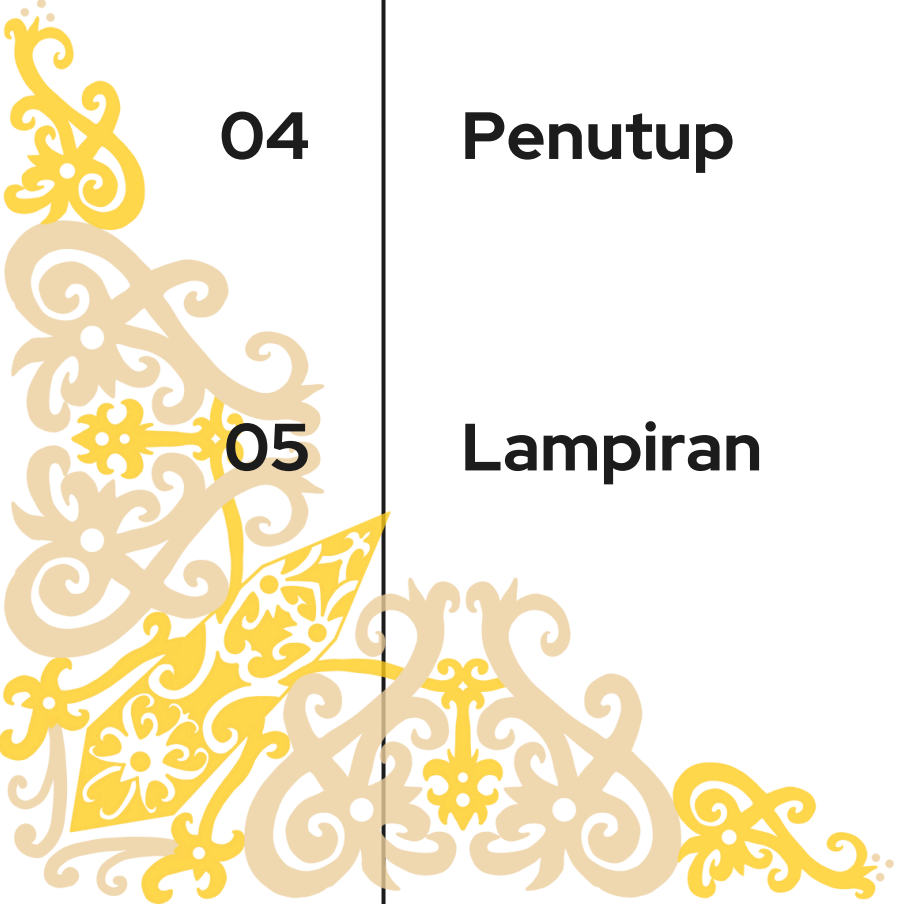
01 **Pendahuluan**

02 **Perencanaan Kinerja**

03 **Akuntabilitas Kinerja**

04 **Penutup**

05 **Lampiran**



PENGANTAR

KEPALA KANWIL DJKN

KALIMANTAN BARAT



Pengantar

Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat

Pada tahun 2024, dunia dihadapkan pada berbagai tantangan global yang signifikan, salah satunya adalah meningkatnya dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Bencana alam yang lebih sering terjadi, seperti banjir, kekeringan, dan badai, telah memengaruhi kehidupan jutaan orang dan mengancam stabilitas ekonomi global. Indonesia, sebagai negara kepulauan yang rentan terhadap perubahan iklim, harus menghadapi konsekuensi serius dari fenomena ini, termasuk dampak terhadap infrastruktur, perekonomian, dan kehidupan masyarakat.

Sebagai salah satu institusi pemerintah yang berperan strategis, Kanwil DJKN Kalimantan Barat juga turut merasakan dampak dari tantangan global ini. Pengalaman dalam menghadapi tantangan tersebut telah mengasah resiliensi organisasi, memacu adaptasi positif, serta memperkuat kemampuan dalam menghadapi situasi sulit. Melalui kemampuan adaptasi yang teruji, kami berhasil mempertahankan ketenangan, menghindari kepanikan, dan membangun keyakinan untuk terus menyesuaikan diri dengan tantangan yang ada.

Namun, tantangan yang dihadapi tidak berarti semakin ringan. Pemerintah tetap dihadapkan pada dinamika global yang kompleks, termasuk ketegangan geopolitik, potensi krisis ekonomi, dan percepatan digitalisasi. Menteri Keuangan telah menegaskan bahwa isu-isu ini merupakan "*game changer*" yang dapat mengubah konstelasi global, sehingga perlu diantisipasi dengan cermat.

Dalam konteks tersebut, Kanwil DJKN Kalimantan Barat terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaik melalui inovasi, optimisme, dan pelayanan prima. Dengan pendekatan ini, seluruh pegawai diarahkan untuk melihat tantangan sebagai peluang dalam menciptakan layanan unggul bagi para pemangku kepentingan. Semangat kolektif dan dedikasi tinggi telah menjadi fondasi bagi kami dalam menghadirkan kinerja terbaik di setiap lini tugas.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal, Kanwil DJKN Kalimantan Barat telah melahirkan berbagai inovasi strategis. Langkah-langkah percepatan SOP layanan dan publikasi aktif melalui berbagai media, termasuk TVRI, RRI, Pontianak Post, media sosial, dan situs web resmi, menjadi

bagian integral dari upaya kami untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran pemerintah dalam pembangunan, peningkatan kesejahteraan, dan pelayanan publik.

Akuntabilitas dan transparansi kinerja kami diwujudkan melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj), yang disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014. Dalam laporan ini, dijabarkan rencana kinerja, pencapaian, serta realisasi anggaran yang telah dilaksanakan. Sepanjang tahun 2024, Kanwil DJKN Kalimantan Barat berhasil mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 116,41%, yang merupakan hasil kerja keras, sinergi, dan kolaborasi seluruh pegawai.

Pencapaian ini mencakup 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang semuanya berada dalam status hijau, sebagai refleksi keberhasilan strategi organisasi. Dalam laporan ini juga disampaikan evaluasi mendalam terhadap kendala yang dihadapi, langkah-langkah mitigasi yang diambil, serta faktor-faktor pendukung yang berkontribusi pada pencapaian target.

Di tengah perubahan yang semakin kompleks akibat perkembangan teknologi dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan pengelolaan

kekayaan negara, piutang negara, dan lelang, Kanwil DJKN Kalimantan Barat terus berupaya menjawab tantangan ini dengan inovasi, transformasi proses bisnis, dan peningkatan pelayanan. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai organisasi yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan, kami berkomitmen untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya demi memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia yang lebih sejahtera.

Semangat kolektif ini terbukti dengan peningkatan NKO sebesar 0,58% dibandingkan tahun 2023. Kanwil DJKN Kalimantan Barat juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bersinergi dalam mendukung pencapaian ini. Kerjasama yang telah terjalin diharapkan dapat terus diperkuat demi mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.

Akhir kata, laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sekaligus sebagai dorongan untuk terus meningkatkan kinerja organisasi. Dengan slogan *SEMPURNA* (Semangat, Proaktif, Tulus, Ramah, dan Amanah), kami bertekad untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan tuntas, serta memberikan kontribusi terbaik bagi Kalimantan Barat dan Indonesia secara keseluruhan.

Kepala Kantor Wilayah DJKN
Kalimantan Barat



Ditandatangani secara elektronik
Tetik Fajar Ruwandari



Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) tahun 2024 merupakan manifestasi dari akuntabilitas dan transparansi yang secara konsisten diimplementasikan oleh Kanwil DJKN Kalimantan Barat. Laporan ini menguraikan secara komprehensif rencana kinerja yang telah dirumuskan, pencapaian atas rencana tersebut, serta realisasi anggaran yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data pengukuran kinerja yang akurat, evaluasi kinerja yang terstruktur, serta analisis mendalam atas hasil-hasil tersebut. Pendekatan ini memastikan bahwa seluruh pencapaian kinerja Kanwil DJKN Kalimantan Barat selama tahun 2024 dapat diungkapkan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mendukung tercapainya tujuan strategis yang telah ditetapkan, Peta Strategi DJKN tahun 2024 dirancang berdasarkan metodologi Balanced Scorecard (BSC). Konsep ini memungkinkan penerjemahan strategi ke dalam tindakan nyata melalui penetapan tujuan strategis yang jelas. Tujuan strategis ini menjadi elemen utama yang dikembangkan lebih lanjut menjadi sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja yang terukur.

Peta strategi Kemenkeu Two DJKN tahun 2024 mencakup empat perspektif yang saling terhubung, yaitu: perspektif pemangku kepentingan (stakeholders perspective), perspektif pelanggan (customer perspective), perspektif proses internal (internal process perspective), serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth perspective). Perspektif-perspektif ini dirinci menjadi 10 sasaran strategis (SS) dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Penentuan IKU didasarkan pada prinsip SMART-C, yakni specific (spesifik dan unik), measurable (dapat diukur secara jelas), agreeable (disepakati oleh semua pihak terkait), realistic (realistis namun tetap menantang), time-bounded (memiliki batas waktu pencapaian), dan continuously improved (terus disempurnakan sesuai perkembangan organisasi). Pendekatan ini memastikan bahwa setiap indikator kinerja mendukung pencapaian tujuan strategis secara optimal.

Pada tahun 2024, pencapaian IKU Kanwil DJKN Kalimantan Barat menunjukkan hasil yang signifikan dengan seluruh 20 IKU berada dalam status hijau. Hal ini mencerminkan keberhasilan organisasi dalam memenuhi target yang telah ditetapkan, dengan Nilai Kinerja Organisasi mencapai 116,41%. Capaian ini merupakan buah dari kolaborasi yang

sinergis dan kerja keras seluruh jajaran Kanwil DJKN Kalimantan Barat. Data pencapaian IKU secara rinci disajikan dalam tabel berikut ini.

Kode	URAIAN IKU	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan			
1a-CP	Indeks Integritas	89,17	92,44
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100,00%	128,88%
Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa			
2a-N	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	142,40%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	129,96%
2c-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100%	154,72%
Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien			
3a-N	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	75	99,65
Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif			
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	126,09%
4b-N	Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	148,57%
Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif			
5a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	67,95%	42,31%
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	89%	179,00%
Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional			
6a-CP	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	16,00%	0%
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			
7a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85	93,57

Kode	URAIAN IKU	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
7b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120%
7c-N	Persentase Penyelesaian Program Kerja Duta Transformasi	75%	161,80%
Pengelolaan keuangan yang akuntabel			
8a-CP	Indeks Kinerja Anggaran	100%	120,00%
8b-N	Persentase deviasi data PNBPN fungsional DJKN	10%	0,00%
Komunikasi publik yang efektif			
9a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55	5,23
9b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	100
Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah			
10a-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	98%	100,00%
10b-N	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZiWBK/WBBM (Unit Tertentu)	100	120

Pada tahun 2024, pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJKN Kalimantan Barat terus menghadapi dinamika global yang kompleks. Pasca transisi kepemimpinan, pemerintah kini dihadapkan pada serangkaian tantangan global baru, termasuk tensi geopolitik, perubahan iklim, serta percepatan transformasi digital. Kondisi ini memerlukan ketahanan dan adaptasi yang kuat untuk memastikan stabilitas ekonomi dan pelayanan publik tetap optimal.

Dalam menghadapi ketidakpastian global, Indonesia telah menunjukkan upaya membangun resiliensi yang tangguh, dengan menjaga momentum

pertumbuhan ekonomi di tengah berbagai tantangan. Menteri Keuangan menegaskan bahwa perubahan iklim, digitalisasi, dan tensi geopolitik merupakan faktor kunci yang akan memengaruhi konstelasi global ke depan. Oleh karena itu, Kanwil DJKN Kalimantan Barat berkomitmen untuk terus beradaptasi dengan perubahan tersebut agar dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan serta memberikan layanan terbaik kepada para pemangku kepentingan.

Pelaksanaan tugas di Kanwil DJKN Kalimantan Barat tetap berjalan dengan optimal melalui pemanfaatan teknologi

informasi. Konsep flexible working space, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2019 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan, memungkinkan pola kerja yang fleksibel seperti Work From Office (WFO), Work From Home (WFH), dan Work From Homebase (WFHb). Fleksibilitas ini mendukung produktivitas tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan.

Semangat dan integritas para pegawai tetap menjadi fondasi utama dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan. Kanwil DJKN Kalimantan Barat terus berinovasi dan melakukan perbaikan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Inovasi yang diimplementasikan antara lain optimasi aplikasi dalam Microsoft Teams, Power BI, dan E-Area Pelayanan Terpadu. Selain itu, dilakukan pula percepatan dan integrasi layanan melalui SOP baru, kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat serta Universitas Tanjungpura, dan peningkatan publikasi yang proaktif dan solutif.

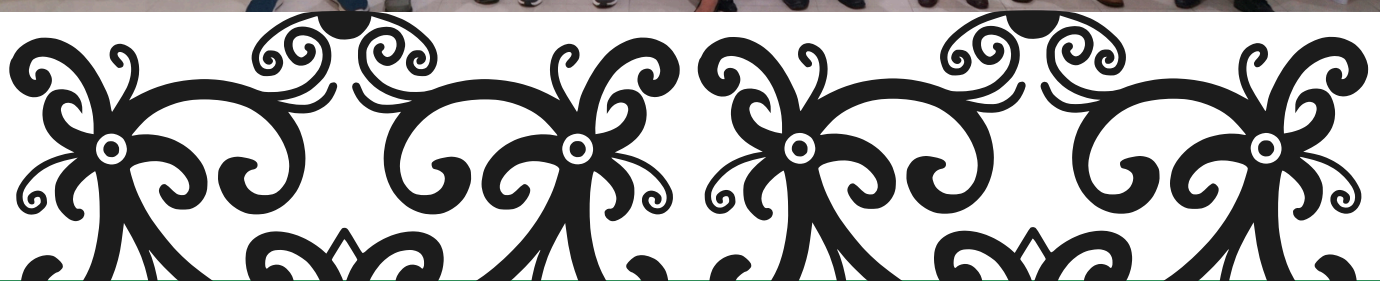
Keberhasilan Kanwil DJKN Kalimantan Barat sepanjang tahun 2024 tercermin melalui berbagai penghargaan dan prestasi yang diraih, antara lain sebagai berikut:

1. Juara 1 Optimalisasi Aset Pada Pengguna Barang Tahun 2023.
2. Peringkat 3 NKO Semester 1 tahun 2024 Tingkat DJKN.
3. Penghargaan dari BRI Regional Office Jakarta III Atas Dukungan dan kerjasama Lelang Hak Tanggungan Tahun 2024.
4. Penghargaan dari Gubernur Kalbar Atas kerjasama Dukungan Penilaian BMD Pemprov Kalbar Tahun 2023.
5. Peringkat 3 NKO Semester 1 tahun 2023 Tingkat DJKN.
6. Peringkat 2 Nilai IKPA Terbaik Semester 2 Tahun 2023.
7. Peringkat 3 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester 2 Tahun 2023.
8. Juara III Lomba Video Reel dari Kanwil DJP Kalbar dalam rangka Hari Pajak Tahun 2023.



Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kanwil DJKN Kalimantan Barat

BAB I PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memiliki peran strategis dalam perumusan dan implementasi kebijakan terkait pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan mandat ini, DJKN diharapkan menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik adalah asas akuntabilitas, yang menegaskan bahwa setiap aktivitas dan hasil akhir yang dihasilkan oleh penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas ini diwujudkan, antara lain, melalui penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja berfungsi sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang tahun 2024. Penyusunan laporan ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 yang mengatur tentang pedoman teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2023 tertanggal 11 Desember 2023 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memiliki mandat untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, serta lelang sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku. Untuk menjalankan mandat tersebut, DJKN melaksanakan berbagai fungsi strategis, yaitu:

1. Merumuskan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang guna memastikan pengelolaan aset negara berjalan efektif dan efisien;
2. Mengimplementasikan kebijakan terkait pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan lelang untuk mencapai tujuan nasional di sektor ini;
3. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai panduan operasional di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
4. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi kepada berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan lelang untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan dan regulasi;
5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, serta pelaporan atas kinerja terkait kekayaan negara, penilaian, dan lelang, sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi publik;
6. Menjalankan administrasi organisasi DJKN untuk mendukung efektivitas operasional dan koordinasi internal;
7. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pemerintah.

Dengan menjalankan fungsi-fungsi ini, DJKN memainkan peran sentral dalam pengelolaan aset negara yang optimal, mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengelolaan kekayaan negara yang strategis dan berkelanjutan.



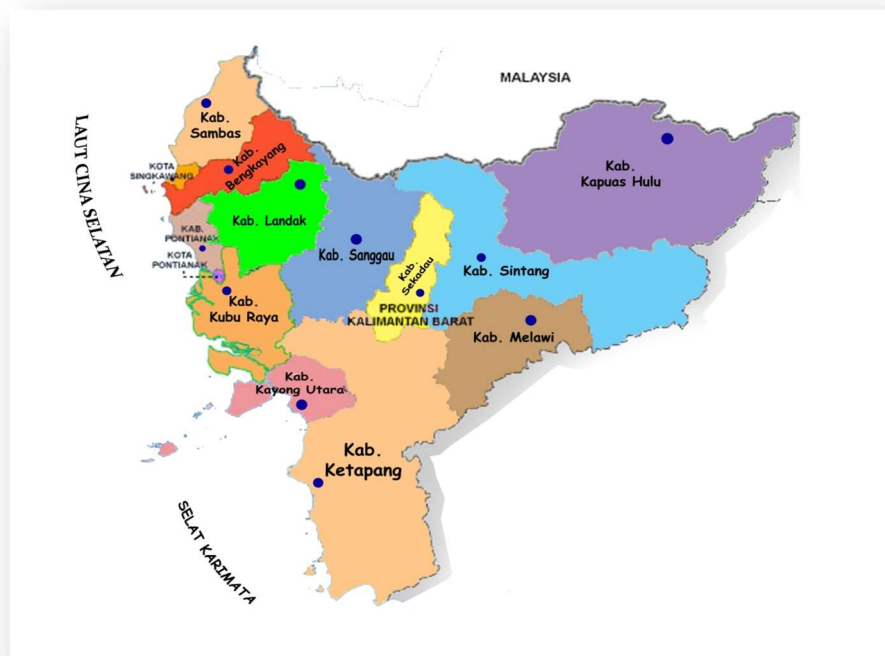
Gambar 1.1 Kanwil DJKN Kalimantan Barat

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Kalimantan Barat, merupakan unit organisasi eselon II yang berfungsi sebagai instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Instansi ini memiliki tanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan berkedudukan di Jalan Letnan Jenderal Sutoyo No. 122, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

Merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN, Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengemban tugas utama berupa koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi, serta pelaksanaan tugas-tugas yang meliputi pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan tugas ini dilakukan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia serta sesuai dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bagian dari struktur organisasi, Kanwil DJKN Kalimantan Barat membawahi dua Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), yaitu KPKNL Pontianak dan KPKNL Singkawang. KPKNL Pontianak berlokasi di Jalan Letnan Jenderal Sutoyo No. 19, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Sementara itu, KPKNL Singkawang terletak di Jalan Aliyang No. 1, Kota Singkawang.

Gambar 1.2 Wilayah Kerja Kanwil DJKN Kalimantan Barat



Wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Kalimantan Barat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, mencakup 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Wilayah kerja ini terbagi berdasarkan yurisdiksi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berada di bawah koordinasinya, yaitu:

Wilayah kerja KPKNL Pontianak:

1. Kota Pontianak
2. Kabupaten Kubu Raya
3. Kabupaten Ketapang
4. Kabupaten Kayong Utara
5. Kabupaten Sanggau
6. Kabupaten Sekadau
7. Kabupaten Sintang
8. Kabupaten Melawi
9. Kabupaten Kapuas Hulu

Wilayah kerja KPKNL Singkawang:

1. Kota Singkawang
2. Kabupaten Sambas
3. Kabupaten Bengkayang
4. Kabupaten Mempawah
5. Kabupaten Landak

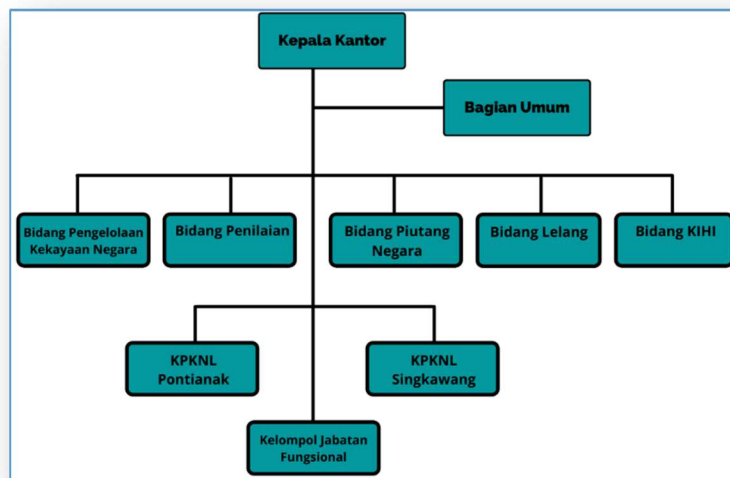
Provinsi Kalimantan Barat, dengan luas wilayah sekitar 147.557 km², memiliki sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan industri pengolahan sebagai pilar utama perekonomian daerah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu telah mendorong masyarakat menjadi lebih kritis, sekaligus meningkatkan ekspektasi terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Untuk merespons kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, Kanwil DJKN Kalimantan Barat terus berkomitmen dalam peningkatan mutu layanan dengan mengacu pada visi dan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sebagai unit eselon II yang bertugas mengoordinasikan, memberikan bimbingan teknis, mengendalikan, mengevaluasi, serta melaksanakan tugas-tugas di bidang kekayaan negara, pengelolaan piutang negara, dan lelang dalam lingkup kerja KPKNL, Kanwil DJKN Kalimantan Barat melaksanakan berbagai fungsi strategis sebagai berikut:

- a. Penyediaan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara.
- b. Supervisi, bimbingan teknis, serta evaluasi tugas-tugas di bidang penilaian aset.
- c. Pemberian bimbingan teknis, penggalan potensi, serta evaluasi dalam pengurusan piutang negara.
- d. Penyusunan bahan pertimbangan terkait usulan penghapusan, keringanan utang, tindakan hukum paksa badan, dan penyelesaian piutang negara.
- e. Penyediaan bimbingan teknis terkait pengelolaan barang jaminan serta pemeriksaan terhadap harta atau barang jaminan yang tidak ditemukan milik debitur atau penjamin.
- f. Pengembangan, evaluasi, dan verifikasi terkait pelaksanaan lelang, termasuk penggalan potensi pasar lelang.
- g. Penyediaan layanan bantuan hukum terkait kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.
- h. Pemantauan dan evaluasi pelayanan informasi, verifikasi pengurusan piutang negara, serta pelaksanaan lelang.
- i. Pembinaan terhadap profesi penilai, usaha jasa lelang, dan pejabat lelang.
- j. Pelaksanaan dan pengawasan teknis terkait pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan kegiatan lelang.
- k. Pelaksanaan langsung tugas penilaian dan pengurusan piutang negara.
- l. Penyelenggaraan administrasi internal Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat.

Melalui peran dan fungsi yang komprehensif ini, Kanwil DJKN Kalimantan Barat berupaya mendukung efisiensi pengelolaan kekayaan negara dan meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Kalimantan Barat.

Gambar 1.3 Struktur Organisasi Kanwil DJKN Kalimantan Barat



Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung dengan struktur organisasi 1 (satu) Kepala Kantor, 1 (satu) bagian umum, 5 (lima) bidang, dan kelompok jabatan fungsional. Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat saat ini didukung oleh 2 (dua) kantor vertikal yaitu KPKNL Pontianak dan KPKNL Singkawang.

Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat dipimpin oleh Kepala Kantor Tetik Fajar Ruwandari dibantu oleh Kepala Bagian Umum Fatchur Berlianto, Kepala Bidang KIH Hardi Sumaryadi, Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Achmakrishna Himawan, Kepala Bidang Penilaian Prihatin, Kepala Bidang Piutang Negara Rohmat, dan Kepala Bidang Lelang Rusmawati Damarsari.

Gambar 1.4 Gambar Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat beserta Para Pejabat Eselon III



Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat didukung oleh 44 Sumber Daya Manusia (SDM) dari berbagai bidang ilmu dan keahlian seperti ekonomi, keuangan, manajemen, hukum, komunikasi, teknik, administrasi, sosial, dan lainnya.

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN GOLONGAN

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

Jenis Kelamin	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
Laki-laki	0	5	12	8	25
Prempuan	0	5	11	3	19
Jumlah	0	10	23	11	44

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN PENDIDIKAN

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
SLTA	1	2	3
D1	0	2	2
D3	3	4	7
D4/S1	12	8	20
S2	9	2	11
S3	0	1	1
Jumlah	25	19	44

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat terus berkomitmen mendorong setiap pegawai untuk meningkatkan kompetensinya dengan cara mengikutsertakan pegawai mengikuti diklat/course/workshop/e-learning atau mendorong setiap pegawai untuk meningkatkan strata/ tingkat pendidikan yang dimiliki. Setiap pegawai yang telah mengikuti diklat/course/workshop/e-learning juga diwajibkan untuk melakukan *knowledge sharing* kepada seluruh pegawai. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini menjadi tuntutan guna memenuhi harapan masyarakat atas kualitas layanan jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat.

C. PERAN STRATEGIS KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN BARAT

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat memiliki peran strategis dalam hal pengelolaan kekayaan negara, penilaian kekayaan negara, pengurusan piutang negara, pelayanan lelang dan memberikan kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ke kas negara. Adapun gambaran peran strategis tersebut adalah :

a. Melakukan pengelolaan kekayaan negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat memiliki peran untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara, dan difokuskan pada utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, pembinaan dan penatausahaan kekayaan negara.

Perubahan paradigma pengelolaan kekayaan negara dari penatausahaan aset (*asset administration*) menjadi manajer aset (*asset manager*) menuntut peran dan tanggung jawab yang lebih besar dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat selaku Pengelola Barang untuk mengelola kekayaan negara lebih optimal dan akuntabel.

Sebagai asset manager menerapkan optimalisasi aset juga terhadap gedung Kanwil DJKN Kalimantan Barat dengan menyewakan ruang pada sayap kiri gedung kepada PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Kas Sutoyo, serta ruang pada sayap kanan gedung yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga (optimalisasi aset).

b. Melakukan penilaian kekayaan negara

Penilaian terhadap kekayaan negara merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara menuju optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Penilaian kekayaan negara meliputi pelaksanaan penilaian, kegiatan standardisasi, bimbingan teknis, analisis, supervisi, evaluasi dan rekomendasi di bidang penilaian. Hasil penilaian Barang Milik Negara tersebut antara lain akan digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara, penerbitan surat berharga oleh Negara dan pengurusan Kekayaan Negara.

c. Memberikan pelayanan piutang negara

Piutang Negara adalah piutang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Dalam lingkup Provinsi Kalimantan Barat, pengurusan piutang negara dilaksanakan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang sebagai panitia interdepartemental yang diketuai oleh Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat. Pengurusan piutang negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan pengelolaan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari Kementerian Negara/ Lembaga, Bendahara Umum Negara, dan Pemerintah Daerah.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan c.q. DJKN untuk meringankan Penanggung Utang (**PU**) adalah melalui *crash program* yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2024. Dalam peraturan tersebut masyarakat khususnya PU diberikan *Crash Program* Keringanan Utang. Kanwil DJKN Kalimantan Barat, KPKNL Pontianak, dan KPKNL Singkawang bekerja sama untuk melakukan sosialisasi baik melalui media sosial maupun secara langsung kepada PU. Kebijakan ini sangat membantu masyarakat dalam penyelesaian utang kepada negara/ daerah.

d. Memberikan pelayanan lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana penjualan sebagaimana dimaksudkan oleh beberapa peraturan perundangan dan sebagai alternatif sarana transaksi penjualan aset kepada masyarakat.

Dalam beberapa peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, lelang dicantumkan sebagai cara pelaksanaan (*execution*) putusan atau ketentuan perundangan tersebut. Lelang dipilih sebagai cara penjualan karena sifatnya yang transparan, akuntabel, kompetitif, efisien dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya akta otentik berupa risalah lelang.

Peningkatan kualitas layanan, regulasi, pengawasan, penggalan potensi dan kemudahan pelaksanaannya terus menerus dilakukan dengan tujuan agar lelang menjadi sarana penjualan yang digunakan secara luas oleh masyarakat (*sales mean auction*).

Untuk meningkatkan potensi penerimaan Pokok Lelang, PNBP Lelang, dan Produktivitas Lelang, Kanwil DJKN Kalimantan Barat senantiasa melakukan koordinasi dan penggalan potensi lelang ke pihak Perbankan, Satuan Kerja Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah di wilayah Kalimantan Barat.

D. Memberikan kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP)

Memberikan kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ke kas negara yang diperoleh dari pemanfaatan Barang Milik Negara, hasil penjualan penghapusan Barang Milik Negara, Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dan Bea Lelang dari setiap pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang di wilayah kerja Kanwil DJKN Kalimantan Barat.

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Untuk memudahkan dalam membaca dan memahami laporan ini, sistematika LAKIN ini kami susun dalam kerangka sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada tugas, fungsi, struktur organisasi serta peran strategis Kanwil DJKN Kalimantan Barat.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan penjelasan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024 beserta addendum kontrak kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

A.1 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pada subbab ini disajikan hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two Kanwil DJKN Kalimantan Barat Tahun 2024.

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Pada Renstra

Pada subbab ini diuraikan perbandingan antara IKU dan capaian Kanwil DJKN Kalimantan Barat dengan Sasaran Strategis 2020-2024.

B. Realisasi Anggaran

B.1 Belanja Pegawai

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi, terutama anggaran belanja pegawai.

B.2 Belanja Barang

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi, terutama anggaran belanja barang.

B.3 Belanja Modal

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi, terutama anggaran belanja modal.

Kesimpulan dan Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Harapan kami, laporan kinerja ini dapat menjadi cerminan kinerja dan prestasi yang telah diraih Kanwil DJKN Kalimantan Barat sekaligus menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur peningkatan kinerja organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat pada tahun yang akan datang.



Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kanwil DJKN Kalimantan Barat

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PENETAPAN KINERJA

Pelaksanaan tugas dan fungsi oleh Kanwil DJKN Kalimantan Barat berpedoman pada visi dan misi DJKN 2020-2024. Visi DJKN 2020-2024 adalah mengelola Kekayaan Negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: menjadi pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

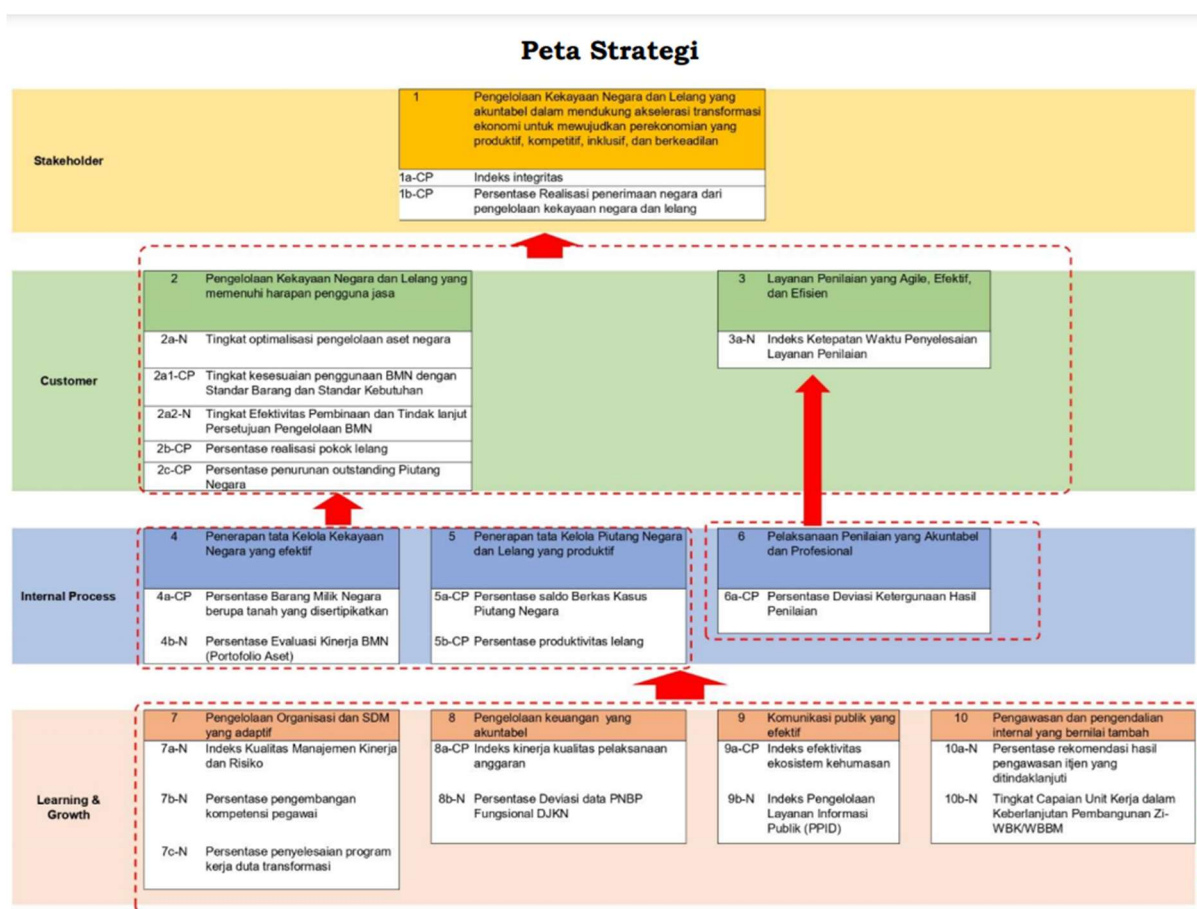
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi yang dijalankan DJKN adalah: (1) Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara; (2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum; (3) Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara; (4) Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; dan (5) Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Dalam melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat perlu membuat suatu penetapan kinerja yang merupakan ikhtisar dari rencana kerja yang akan dicapai pada waktu satu tahun. Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sementara itu, dokumen Penetapan/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Penetapan Kinerja Kanwil DJKN Kalimantan Barat tahun 2024 sesuai dengan peta strategis yang tertuang Kemenkeu *Two* terdiri dari 10 Sasaran Strategis (SS) dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun peta strategis Kanwil DJKN Kalimantan Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Ikhtisar Sasaran Strategis



Rincian selengkapnya tentang SS dan IKU dan keterkaitannya ada pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Two* Kepala Kantor Wilayah tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Uraian IKU

Kode	URAIAN IKU	Target Tahun 2024
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan		
1a-CP	Indeks Integritas	89,17
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100,00%
Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa		
2a-N	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%
2c-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100%

Kode	URAIAN IKU	Target Tahun 2024
Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien		
3a-N	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	75
Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif		
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
4b-N	Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif		
5a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	67,95%
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	89%
Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional		
6a-CP	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	16,00%
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif		
7a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85
7b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
7c-N	Persentase Penyelesaian Program Kerja Duta Transformasi	75%
Pengelolaan keuangan yang akuntabel		
8a-CP	Indeks Kinerja Anggaran	100%
8b-N	Persentase deviasi data PNBPN fungsional DJKN	10%
Komunikasi publik yang efektif		
9a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55
9b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah		
10a-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	98%

Kode	URAIAN IKU	Target Tahun 2024
10b-N	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZiWBK/WBBM (Unit Tertentu)	100

Anggaran pada tahun 2024 beberapa kali mengalami revisi untuk mendukung program pemerintah dalam rangka penghematan. Adapun rincian anggaran Kanwil DJKN Kalimantan Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Rincian Anggaran Kanwil DJKN Kalimantan Barat Tahun 2024

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)		REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)
	AWAL	AKHIR			
BELANJA PEGAWAI	-	-	-	-	-
BELANJA BARANG	2,994,225,000	3,126,275,000	2,891,516,122	92,49%	234,758,878
BELANJA MODAL	3,455,467,000	3,455,467,000	3,411,031,201	98.71%	44,435,799
JUMLAH	6,449,692,000	6,581,742,000	6,302,547,323	95,76%	279,194,677

Untuk menerjemahkan strategi kedalam suatu tindakan, sebagai wujud dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, sejak awal 2008 Kementerian Keuangan telah menerapkan manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). BSC berfungsi sebagai alat pengukuran kinerja agar tujuan organisasi tercapai dan terkelola secara efektif dan efisien. BSC dipilih sebagai sistem manajemen strategis dan pengukuran kinerja Kementerian Keuangan karena beberapa faktor, antara lain :

1. mampu menerjemahkan strategi organisasi dalam suatu tindakan;
2. memberikan pandangan yang komprehensif tentang kinerja organisasi dengan memperhitungkan perspektif finansial dan non-finansial, serta lingkungan internal maupun eksternal organisasi dan keadaan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang;
3. memberikan umpan balik untuk peningkatan/perbaikan kinerja pada periode berjalan dan peningkatan/perbaikan kinerja di masa mendatang;
4. memiliki konsep sebab akibat dimana pencapaian kinerja diperoleh dari serangkaian proses dari masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus menjadi landasan penyusunan strategi. BSC merupakan suatu konsep yang menjabarkan strategi menjadi suatu tindakan dengan menetapkan tujuan strategisnya. Tujuan strategis merupakan faktor utama yang harus ada

dalam BSC yang kemudian dikembangkan menjadi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerjanya. Tujuan strategis ini dipetakan kedalam suatu peta strategi

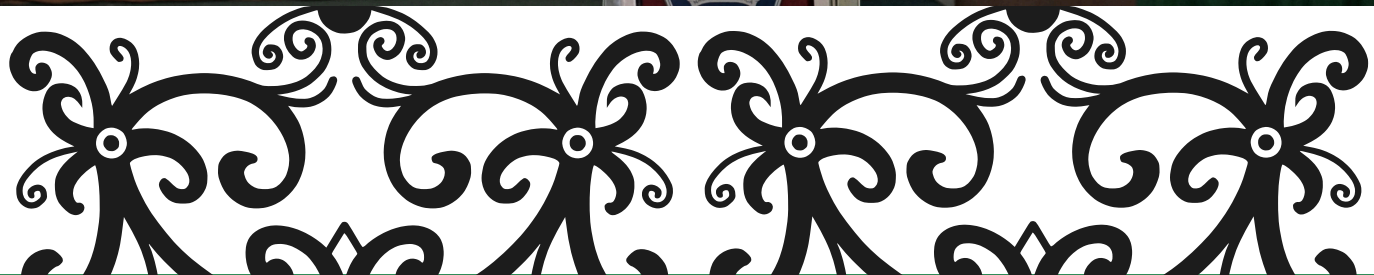
Peta Strategi Kemenkeu *One DJKN* Tahun 2024 menerapkan 4 perspektif yang saling berhubungan, yaitu: ***stakeholders perspective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective***. *Stakeholders perspective* berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh stakeholder. *Customer perspective* berisi ekspektasi dari customer dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal process perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Sedangkan *learning and growth perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan.

Empat perspektif tersebut kemudian diuraikan kedalam 10 Sasaran Strategis (SS) dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Penentuan IKU juga menganut prinsip SMART-C, yaitu *specific* (menyatakan sesuatu yang khas/unik), *measurable* (dapat diukur dengan jelas), *agreeable* (disepakati), *realistic* (dapat dicapai, namun menantang), *time-bounded* (memiliki batas waktu pencapaian), dan *continuously improved* (dapat menyesuaikan perkembangan strategi organisasi).



Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kanwil DJKN Kalimantan Barat

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Kanwil DJKN Kalimantan Barat selama tahun 2024 dapat dilihat dari beberapa perspektif yang meliputi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), anggaran, dan kinerja lainnya yang dicerminkan dari inovasi, dan penghargaan yang memberikan manfaat baik kepada internal organisasi maupun kepada masyarakat secara luas. Kanwil DJKN Kalimantan Barat senantiasa melaksanakan evaluasi internal melalui Dialog Kinerja Organisasi (DKO) setiap bulan dan rabu strategis sebagai upaya monitoring dan memperkuat pengelolaan kinerja organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Kanwil DJKN Kalimantan Barat tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif. Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2024 terhadap 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two Kanwil DJKN Kalimantan Barat Tahun 2024, diperoleh **Nilai Kinerja Organisasi sebesar 116,41**. Nilai tersebut berasal dari capain kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Perspektif Capain Kinerja 2024

NO.	PERSPEKTIF	BOBOT PERSPEKTIF (%)	BOBOT CAPAIAN (%)
1	<i>Stakeholder</i>	30	33.18
2	<i>Customer</i>	20	24.00
3	<i>Internal proses</i>	25	30.00
4	<i>Learning & Growth</i>	25	29.23
Nilai Kinerja Organisasi		100	116.41

Rincian perbandingan target dan realisasi dari 20 (dua puluh) IKU dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Perbandingan Target, Realisasi IKU, Capaian dan Nilai Kinerja 2024

No.	URAIAN IKU	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Nilai Kinerja 2024
1	Indeks Integritas	89,17	92,44	103,67	103,67
2	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100	128,88	128,88	120,00
3	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100	142,40	142,40	120,00
4	Persentase realisasi pokok lelang	100	259,09	259,09	120,00
5	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100	154,72	154,72	120,00
6	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	75	99,65	132,87	120,00
7	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100	126,09	126,09	120,00
8	Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100	148,57	148,57	120,00
9	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	67,95	42,31	137,74	120,00
10	Persentase produktivitas lelang	89	179,00	135,89	120,00
11	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	16,00	0	200,00	120,00
12	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85	93,57	110,08	110,08
13	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100	120	120,00	120,00
14	Persentase Penyelesaian Program Kerja Duta Transformasi	75	161,80	215,73	120,00
15	Indeks Kinerja Anggaran	100	120,00	120,00	120,00
16	Persentase deviasi data PNBP fungsional DJKN	10	0	200,00	120,00
17	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55	5,23	147,32	120,00
18	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	100	125,00	120,00

No.	URAIAN IKU	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Nilai Kinerja 2024
19	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	98	100	102,04	102,04
20	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZiWBK/WBBM (Unit Tertentu)	100	120	120,00	120,00

Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat Tahun 2024 adalah **116,41**. Nilai NKO ini mengalami kenaikan dari tahun 2023 dari 115,83 menjadi 116,41, hal ini menunjukkan komitmen dari seluruh insan di Kanwil DJKN untuk mendukung pencapaian target dengan tantangan.

Rincian capaian dari masing-masing IKU sebagaimana data terlampir. Berikut adalah tabel data Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat antara tahun 2015 sampai dengan 2024.

Tabel 3.3 Nilai NKO pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat tahun 2014 sampai dengan 2024

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah IKU	18	16	21	18	16	20	19	20	20	20
NKO	113,92	111,35	110,60	113,14	113,14	109,29	111,76	114,69	115,83	116,41

A.1 Analisis Capaian

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two Kanwil DJKN Kalimantan Barat Tahun 2024, diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two Kanwil DJKN Kalimantan Barat Tahun 2024, sebagai berikut:

a. IKU 1a-CP Indeks Integritas

Pada tahun ini, target yang ditetapkan untuk Indeks Integritas adalah **89,17**, sebuah angka yang mencerminkan standar tinggi dalam tata kelola yang baik. Namun, realisasi yang berhasil dicapai adalah **92,44**, melampaui target yang telah ditentukan. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya penguatan budaya integritas melalui berbagai program, seperti peningkatan pemahaman nilai-nilai organisasi, pengawasan yang lebih ketat, serta pelibatan seluruh elemen organisasi dalam penerapan nilai-nilai integritas, telah berjalan dengan efektif.

DJKN	<i>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan</i>							
	Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
TARGET	10	20	20	30	30	89,17	89,17	Max
REALISASI	10	20	20	42	42	92,44	92,44	P/L
CAPAIAN	100	100	100	140	140	103,67	103,67	
NILAI KINERJA	100	100	100	120	120	120	120	

b. IKU 1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Target IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang di Tahun 2024 adalah sebesar Rp37.016.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp47.705.837.478,00 dimana capaian IKU sebesar 128,88%.

Adapun rincian IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah sebagai berikut, yaitu:

a. Kanwil DJKN Kalimantan Barat

Target PNBP dari Kanwil DJKN Kalimantan Barat tahun 2024 sebesar Rp394.290.000,00 realisasi sebesar Rp3.552.504.422,00

b. KPKNL Pontianak

Target PNBP dari KPKNL Pontianak tahun 2024 sebesar Rp31.430.900.000,00 realisasi sebesar Rp38.952.253.551,00

c. KPKNL Singkawang

Target PNBP dari KPKNL Singkawang tahun 2024 sebesar Rp5.190.810.000,00 dengan realisasi Rp5.201.079.505,00

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengamankan tercapainya target tahun 2024 yaitu:

- Melakukan koordinasi secara intensif dengan Satuan Kerja untuk melakukan lelang BMN yang telah disetujui penghapusannya;
- Melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri untuk melakukan lelang barang rampasan.

DJKN	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
TARGET	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Max
REALISASI	178,44%	131,46%	131,46%	138,18%	138,18%	128,88%	128,88%	P/M
CAPAIAN	178,44%	131,46%	131,46%	138,18%	138,18%	128,88%	128,88%	
NILAI KINERJA	120	120	120	120	120	120	120	

c. IKU 2a-N Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

IKU ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana aset negara dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan prinsip pengelolaan yang efektif, efisien, dan bernilai tambah. Target 100% merepresentasikan tingkat pencapaian optimal berdasarkan standar yang telah ditetapkan.

Namun, pada tahun ini, realisasi IKU ini mencapai 142,40%, menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan aset negara tidak hanya memenuhi target, tetapi melampaui ekspektasi.

Capaian 142,40% ini tidak hanya menjadi bukti keberhasilan transformasi pengelolaan aset negara, tetapi juga menunjukkan komitmen Kanwil DJKN Kalimantan Barat untuk terus meningkatkan kinerja demi mendukung pembangunan nasional dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

DJKN	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa							
	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
TARGET	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Max
REALISASI		211,21	211,21	199,16	199,16	142,40	142,40	P/M
CAPAIAN		211,21	211,21	199,16	199,16	142,40	142,40	
NILAI KINERJA		120	120	120	120	120	120	

d. IKU 2b-CP Persentase realisasi pokok lelang

Kanwil DJKN Kalimantan Barat terkait pelayanan lelang memiliki fungsi pengawasan dan fungsi koordinasi dalam rangka peningkatan pelaksanaan lelang yang potensial. Peningkatan pelaksanaan lelang yang potensial dilakukan melalui penggalian potensi lelang, koordinasi masif dengan stakeholder di tingkat regional, peningkatan pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang Kelas II dan Balai Lelang yang aktif melaksanakan lelang di wilayah Kalimantan Barat.

Tahun 2024 terjadi peningkatan realisasi Pokok Lelang yang sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Capaian Pokok Lelang tahun 2024 sebesar Rp929.387.100.598,00 dari target sebesar Rp715.143.800.000,00 atau capaian sebesar 129,96%.

Penambahan informasi pelaksanaan lelang dengan menggunakan berbagai saluran informasi yang masif dan memiliki jangkauan yang kuat dan berpengaruh diupayakan untuk dimanfaatkan.

DJKN	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa							
	Persentase realisasi pokok lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
TARGET	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Max
REALISASI	256,23%	294,86%	294,86%	250,81%	250,81%	259,09%	259,09%	P/M
CAPAIAN	256,23%	294,86%	294,86%	250,81%	250,81%	259,09%	259,09%	
NILAI KINERJA	120	120	120	120	120	120	120	

e. IKU 2c-CP Persentase penurunan outstanding piutang negara

Tingkat penurunan outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan Piutang Negara dan penagihan yang telah dilakukan. Capaian penurunan nilai *outstanding* Piutang Negara pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat memperoleh hasil sebesar Rp3.094.405.738,00 atau capaian sebesar 154,72%.

Keberhasilan pencapaian ini didukung dengan upaya-upaya antara lain efektifitas pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait antara lain Penyerah Piutang BKPN dan lain-lain, intensifikasi penagihan dan melakukan optimalisasi

pengurusan Piutang Negara, monitoring dan evaluasi yang terprogram dengan baik dan berkelanjutan terhadap kinerja KPKNL.

DJKN	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa							
	Persentase penurunan outstanding piutang negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
TARGET	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Max
REALISASI	180,46%	126,65%	126,65%	107,35%	107,35%	154,72%	154,72%	P/M
CAPAIAN	180,46%	126,65%	126,65%	107,35%	107,35%	154,72%	154,72%	
NILAI KINERJA	120	120	120	107	107	120	120	

f. IKU 3a-N Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian

Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian merupakan salah satu indikator kinerja yang menggambarkan tingkat kecepatan dan ketepatan unit kerja dalam menyelesaikan proses layanan penilaian sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. Indikator ini mencerminkan komitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pada tahun ini, target yang telah ditetapkan untuk indikator ini adalah 75. Namun, dengan upaya yang konsisten, peningkatan sistem kerja, optimalisasi sumber daya, serta penguatan koordinasi antar tim, realisasi indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat berhasil mencapai 99,65.

DJKN	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
TARGET	75	75	75	75	75	75	75	Max
REALISASI	106,57	92,86	92,86	99,19	99,19	99,65	99,65	P/M
CAPAIAN	142,09	123,81	123,81	132,26	132,26	132,87	132,87	
NILAI KINERJA	120	120	120	120	120	120	120	

g. IKU 3a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan

Pada Tahun 2024, Kanwil DJKN Kalbar Bersama berhasil meraih capaian IKU dengan indeks tanpa batas sebesar 126,09%. Pencapaian ini tentu saja tidak lepas dari koordinasi dan sinergi yang dilakukan oleh Bidang PKN Kanwil DJKN Kalimantan Barat dengan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat, seluruh Kantor Pertanahan di wilayah Kalimantan Barat, KPKNL Pontianak, KPKNL Singkawang serta satuan kerja target sertifikasi.

Hal-hal yang mendukung capaian sertifikasi BMN antara lain:

- Peraturan Bersama antara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN dengan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24/PMK.06/2009 tentang Pensertifikatan BMN berupa tanah dimana tindak lanjut dari Peraturan Bersama tersebut adalah kedua belah pihak membuat Berita Acara Kesepahaman Kerjasama Percepatan Pelaksanaan penerbitan sertifikat tanah, masing-masing pihak baik DJKN maupun BPN mempunyai target yang harus dicapai;
- Meningkatnya kesadaran dan pemahaman satker target terhadap prosedur pensertifikatan BMN berupa tanah;
- Koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan monitoring secara intensif sehingga penyelesaian permasalahan dapat dilakukan dengan cepat;
- Aplikasi SIMANTAP sangat mendukung satker, Kanwil, serta KPKNL dalam meng-*update* dan memproses pensertifikatan tanah;
- Pihak BPN dan unit kantor layanan yang sangat responsif dan solutif terhadap permohonan sertifikasi BMN.

DJKN	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif							
	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
TARGET	20,00%	40,00%	40,00%	60,00%	60,00%	100,00%	100,00%	Max
REALISASI		69,57%	69,57%	164,29%	164,29%	126,09%	126,09%	P/M
CAPAIAN		173,91%	173,91%	273,81%	273,81%	126,09%	126,09%	
NILAI KINERJA		120	120	120	120	120	120	

h. IKU 3b-N Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Capaian IKU **Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)** di Tahun 2024 sebesar 148,57% dari target sebesar 100%, sehingga capaian IKU dengan indeks max. 120 sebesar 120%. Pencapaian ini tentu saja tidak lepas dari kerja keras, koordinasi dan sinergi yang dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Negara pada Kanwil DJKN Kanwil DJKN

Kalimantan Barat dan juga Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara pada KPKNL Pontianak dan KPKNL Singkawang dengan satuan kerja terkait.

DJKN	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif							
	Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
TARGET	10,00%	32,00%	32,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%	Max
REALISASI	22,02%	59,17%	59,17%	97,50%	97,50%	148,57%	148,57%	P/M
CAPAIAN	220,24%	184,90%	184,90%	121,88%	121,88%	148,57%	148,57%	
NILAI KINERJA	120	120	120	120	120	120	120	

i. IKU 5a-CP Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara

IKU persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) merupakan salah satu parameter penting dalam mengukur efektivitas pengelolaan piutang negara oleh Kanwil DJKN Kalimantan Barat. Capaian indikator ini mencerminkan kemampuan pemerintah untuk menyelesaikan atau menurunkan saldo BKPN sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut melibatkan serangkaian proses yang terencana dan terukur. Hal ini mencakup:

1. Pemutakhiran Data BKPN

Dilakukan secara berkala untuk memastikan validitas informasi terkait debitur, jumlah piutang, serta status penyelesaian kasus. Data yang akurat menjadi fondasi utama dalam merancang langkah penyelesaian.

2. Pendekatan Proaktif

Tim pengelola piutang negara menerapkan pendekatan proaktif melalui komunikasi intensif dengan para debitur, pemberi pinjaman, dan pihak terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk mendorong penyelesaian piutang secara lebih cepat dan efisien.

3. Optimalisasi Teknologi Informasi

Penggunaan aplikasi manajemen piutang negara memungkinkan pemantauan real-time terhadap perkembangan saldo BKPN. Dengan sistem yang terintegrasi, proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akurat.

4. Koordinasi dan Kolaborasi

Melibatkan sinergi antara DJKN, kementerian/lembaga terkait, serta pemerintah daerah guna mempercepat penyelesaian kasus piutang yang kompleks.

5. Pengawasan dan Evaluasi

Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan strategi yang diterapkan berjalan efektif. Jika ditemukan kendala, langkah korektif segera dilakukan saat ini.

DJKN	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif							
	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
TARGET	96,00%	90,00%	90,00%	81,00%	81,00%	67,95%	67,95%	Min
REALISASI	94,00%	87,18%	87,18%	75,00%	75,00%	42,31%	42,31%	P/M
CAPAIAN	97,92%	96,87%	96,87%	92,59%	92,59%	62,26%	62,26%	
NILAI KINERJA	97,92	96,87	96,87	92,59	92,59	62,26	62,26	

j. 5b-CP Persentase produktivitas lelang

Target produktivitas lelang sebesar 89% untuk tahun 2024 dapat direalisasikan sebesar 179,00%. Terlampauinya target produktivitas lelang menjadi indikasi dinamika perekonomian di wilayah Kalimantan Barat yang mengalami pemulihan ekonomi dampak pandemik. Jaringan kerjasama dan komunikasi yang baik dengan pihak *stakeholder* yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Focus Group Discussion (FGD) dan intensitas penyebaran informasi tentang meningkatkan pengetahuan dan wawasan terkait pelayanan Lelang.

DJKN	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif							
	Persentase produktivitas lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
TARGET	30,00%	45,00%	45,00%	60,00%	60,00%	89,00%	89,00%	Max
REALISASI	54,12%	70,92%	70,92%	96,93%	96,93%	120,94%	120,94%	P/M
CAPAIAN	180,41%	157,60%	157,60%	161,55%	161,55%	135,89%	135,89%	
NILAI KINERJA	120	120	120	120	120	120	120	

k. 6a-CP Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian

IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat akurasi dan relevansi hasil penilaian dalam mendukung kebutuhan dan tujuan pengguna. Indikator ini mencerminkan sejauh mana hasil penilaian sesuai dengan harapan pemangku kepentingan, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal dalam pengambilan keputusan.

Capaian indikator ini ditentukan melalui perhitungan deviasi antara hasil penilaian aktual dan tingkat pemanfaatannya oleh pihak yang membutuhkan. Semakin kecil deviasi yang dihasilkan, semakin baik kinerja yang dicapai. Ini menunjukkan bahwa hasil penilaian tidak hanya memenuhi standar kualitas, tetapi juga tepat sasaran, relevan, dan aplikatif. Pada tahun 2024 deviasi penilaian pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat adalah sebesar 0,00% dibawah target yang ditetapkan yaitu 16%.

DJKN	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional							
	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
TARGET	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	Min
REALISASI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	P/M
CAPAIAN	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	
NILAI KINERJA	120	120	120	120	120	120	120	

l. 7a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko

IKU "Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko" bertujuan untuk mengukur seberapa baik organisasi mampu mengelola kinerja dan risiko secara holistik, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dengan target awal yang ditetapkan sebesar **85**, hasil realisasi mencapai **93,57**, melampaui target dengan capaian **110,08%**.

Realisasi yang melebihi target ini menunjukkan komitmen Kanwil DJKN Kalimantan Barat dalam mewujudkan tata kelola yang unggul dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis. Ke depan, keberhasilan ini akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas manajemen kinerja dan risiko, guna mencapai visi jangka panjang organisasi secara berkelanjutan.

DJKN	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
TARGET	85	85	85	85	85	85	85	Max
REALISASI	100	96	96	92	92	94	94	P/M
CAPAIAN	117,65	112,66	112,66	108,04	108,04	110,08	110,08	
NILAI KINERJA	117,65	112,66	112,66	108,04	108,04	110,08	110,08	

m. 7b-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai

Definisi IKU Presentase Pengembangan Kompetensi Pegawai mengukur persentase banyaknya pegawai yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Tujuan adanya IKU ini adalah untuk mengukur upaya dalam mengembangkan SDM melalui alokasi waktu kerja yang digunakan untuk mengikuti pelatihan penyelenggara.

Pada tahun 2024, persentase pengembangan pegawai mencapai 120% dan telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. Hal yang mendukung pencapaian target ini antara lain banyaknya pelaksanaan diklat yang ditawarkan oleh Kantor Pusat DJKN dan adanya aplikasi diklat yang memudahkan pegawai dalam menentukan diklat yang akan diikutinya.

DJKN	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	Persentase pengembangan kompetensi pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
TARGET	15,00%	40,00%	40,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%	Max
REALISASI	26,67%	94,29%	94,29%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	P/M
CAPAIAN	177,78%	235,71%	235,71%	160,00%	160,00%	120,00%	120,00%	
NILAI KINERJA	120	120	120	120	120	120	120	

n. 7c-N Persentase Penyelesaian Program Kerja Duta Transformasi

IKU ini mengukur sejauh mana program kerja yang dirancang oleh Duta Transformasi dapat diselesaikan sesuai rencana, mencerminkan efektivitas dan efisiensi

pelaksanaan program. Dengan target yang ditetapkan sebesar **75%**, realisasi yang mencapai **161,80%** menunjukkan kinerja yang luar biasa di atas ekspektasi.

Hasil ini menegaskan bahwa Duta Transformasi tidak hanya memenuhi tugas mereka, tetapi juga memberikan kontribusi lebih besar terhadap transformasi organisasi. Hal ini menjadi bukti komitmen untuk mendorong perubahan positif yang berkelanjutan dan memberikan pelayanan terbaik.

DJKN	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	Persentase Penyelesaian Program Kerja Duta Transformasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
TARGET	5,00%	20,00%	20,00%	45,00%	45,00%	75,00%	75,00%	Max
REALISASI	5,00%	51,00%	51,00%	98,11%	98,11%	161,80%	161,80%	P/M
CAPAIAN	100,00%	255,00%	255,00%	218,02%	218,02%	215,73%	215,73%	
NILAI KINERJA	100	120	120	120	120	120	120	

o. 8a-CP Indeks Kinerja Anggaran

Indeks Kinerja Anggaran merupakan salah satu IKU yang digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan akurasi dalam pengelolaan anggaran. Target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%, yang mencerminkan pencapaian sempurna dari rencana dan alokasi anggaran sesuai dengan perencanaan awal.

Namun, pada realisasi tahun ini, Indeks Kinerja Anggaran mencapai 120%, melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran tidak hanya memenuhi target awal, tetapi juga menghasilkan manfaat tambahan yang signifikan.

DJKN	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
	Indeks Kinerja Anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
TARGET	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Max
REALISASI	120,00%	120,00%	120,00%	102,01%	102,01%	120,00%	120,00%	P/M
CAPAIAN	120,00%	120,00%	120,00%	102,01%	102,01%	120,00%	120,00%	
NILAI KINERJA	120,00	120,00	120,00	102,01	102,01	120,00	120,00	

p. 8b-N Persentase deviasi data PNBP fungsional DJKN

IKU "Persentase deviasi data PNBP fungsional DJKN" menggambarkan sejauh mana kualitas dan akurasi pengelolaan data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Capaian indikator ini mencerminkan kemampuan DJKN dalam memastikan keselarasan antara data PNBP yang tercatat dengan kondisi aktual di lapangan, sehingga mampu mendukung pengambilan keputusan strategis yang berbasis data. Semakin kecil deviasi yang dihasilkan, semakin baik kinerja yang dicapai. Pada tahun 2024 target deviasi PNBP dari Kanwil DJKN Kalimantan Barat adalah 10,00% dengan realisasi 0,00%.

DJKN	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
	Persentase deviasi data PNBP fungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
TARGET	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	Min
REALISASI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	P/M
CAPAIAN	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	
NILAI KINERJA	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

q. 9a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan

Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan adalah IKU yang digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas berbagai aktivitas komunikasi dan kehumasan dalam mendukung tujuan organisasi. Indeks ini mencakup penilaian terhadap strategi komunikasi, pelaksanaan program kehumasan, kualitas hubungan dengan pemangku kepentingan, serta dampaknya terhadap citra dan kepercayaan publik terhadap organisasi.

Pada tahun 2024, target yang ditetapkan untuk Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan adalah 3,55. Angka ini merepresentasikan standar pencapaian yang dianggap cukup baik dalam mendukung ekosistem komunikasi yang efisien dan strategis. Namun, realisasi yang dicapai mencapai 5,23, jauh melampaui target yang ditentukan.

DJKN	Komunikasi publik yang efektif							
	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
TARGET	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	Max
REALISASI	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	P/M
CAPAIAN	147,32%	147,32%	147,32%	147,32%	147,32%	147,32%	147,32%	
NILAI KINERJA	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

r. 9b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)

Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) adalah IKU yang mencerminkan kualitas pengelolaan layanan informasi publik oleh instansi pemerintah. Indikator ini dinilai berdasarkan kemampuan instansi untuk menyediakan, mengelola, dan menyampaikan informasi kepada publik secara transparan, akurat, dan tepat waktu, sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi yang diamanatkan oleh undang-undang.

Pada tahun 2024, target yang ditetapkan untuk indeks pengelolaan layanan informasi publik adalah 80, mencerminkan standar pelayanan yang sangat baik dalam menyediakan akses informasi publik. Namun, melalui komitmen kuat, inovasi dalam pengelolaan informasi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, realisasi IKU ini pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat berhasil mencapai angka 100.

DJKN	Komunikasi publik yang efektif							
	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
TARGET	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	Max
REALISASI	101,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	P/M
CAPAIAN	126,63%	125,00%	125,00%	125,00%	125,00%	125,00%	125,00%	
NILAI KINERJA	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

s. 10a-N Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti

IKU ini mengukur tingkat efektivitas dan responsivitas terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen). Rekomendasi tersebut

dihasilkan dari proses audit, evaluasi, atau pengawasan yang bertujuan untuk memperbaiki tata kelola, akuntabilitas, serta pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan organisasi.

Target kinerja untuk indikator ini adalah 98%, yang mencerminkan komitmen kuat untuk menindaklanjuti hampir seluruh rekomendasi yang telah disampaikan oleh Itjen. Namun, realisasi kinerja menunjukkan hasil yang melampaui target, yaitu mencapai 102,04%. Ini berarti bahwa seluruh rekomendasi yang diberikan kepada Kanwil DJKN Kalimantan Barat telah ditindaklanjuti sepenuhnya.

DJKN	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
TARGET	35,00%	40,00%	40,00%	60,00%	60,00%	98,00%	98,00%	Max
REALISASI	86,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	102,04%	P/M
CAPAIAN	247,62%	250,00%	250,00%	166,67%	166,67%	102,04%	102,04%	
NILAI KINERJA	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	102,04	102,04	

t. 10b-N Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM (Unit Tertentu)

IKU ini mengukur keberhasilan unit kerja dalam mempertahankan dan meningkatkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Nilai indikator dihitung berdasarkan capaian program, inovasi yang diterapkan, serta komitmen berkelanjutan terhadap prinsip-prinsip good governance.

Penetapan target ini mencerminkan harapan agar seluruh unit kerja dapat memenuhi standar minimum yang telah ditentukan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM.

Capaian realisasi sebesar 120 menunjukkan bahwa unit kerja tidak hanya berhasil memenuhi target, tetapi juga melampaui ekspektasi yang telah ditetapkan.

DJKN	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							
	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan Zi-WBK/WBBM (Unit Tertentu)							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
TARGET	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Max
REALISASI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	120,00	120,00%	P/M
CAPAIAN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	120,00%	120,00%	
NILAI KINERJA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	120,00	120,00	

B. REALISASI ANGGARAN

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, realisasi anggaran belanja Kanwil DJKN Kalimantan Barat mencapai **95,76%**. Kanwil DJKN Kalimantan Barat senantiasa mengelola anggaran sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dipertanggungjawabkan. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran belanja TA 2024 tersaji dalam tabel berikut ini:

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)		REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)
	AWAL	AKHIR			
BELANJA PEGAWAI	-	-	-	-	-
BELANJA BARANG	2,994,225,000	3,126,275,000	2,891,516,122	92,49%	234,758,878
BELANJA MODAL	3,455,467,000	3,455,467,000	3,411,031,201	98,71%	44,435,799
JUMLAH	6,449,692,000	6,581,742,000	6,302,547,323	95,76%	279,194,677

C. ACHIEVEMENT KANWIL DJKN KALIMANTAN BARAT

C.1 Peringkat 3 NKO Semester 1 tahun 2023 Tingkat DJKN



C.2 Juara 1 Optimalisasi Aset Pada Pengguna Barang Tahun 2023



C.3 Peringkat 3 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester 2 Tahun 2023



C4 Peringkat 2 Nilai IKPA Terbaik Semester 2 Tahun 2023



C.5 Peringkat 3 NKO Semester 1 tahun 2024 Tingkat DJKN



C.6. Piagam Penghargaan dari Gubernur Kalbar Atas kerjasama Dukungan Penilaian BMD Pemprov Kalbar Tahun 2023



C.7 Juara III Lomba Video Reel dari Kanwil DJP Kalbar dalam rangka Hari Pajak Tahun 2023



C.8 Piagam Penghargaan dari BRI Regional Office Jakarta III Atas Dukungan dan kerjasama Lelang Hak Tanggungan Tahun 2024



D. INOVASI DAN KEBERLANJUTANNYA

D.1 Inovasi layanan online dengan Aplikasi SIMPELMAN

Kanwil DJKN Kalimantan Barat terus mengembangkan Aplikasi SIMPELMAN (Sistem Informasi Monitoring Pelayanan Manajemen Aset Negara).

Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan secara online, cepat, transparan, dan efisien. Dengan SIMPELMAN, proses administrasi yang dulu memakan waktu kini dapat diselesaikan hanya dalam beberapa klik, kapan saja dan di mana saja.

D.2 Inovasi Program Agen Perubahan

Agen Perubahan hadir sebagai motor penggerak transformasi organisasi, membangun budaya kerja yang unggul, dan mendorong setiap individu untuk menjadi pelaku perubahan.

Melalui program ini, Kanwil DJKN Kalimantan Barat menunjuk individu-individu inspiratif yang siap menjadi contoh teladan dalam etika kerja, profesionalisme, dan inovasi. Para agen perubahan ini tidak hanya membawa gagasan, tetapi juga aksi nyata yang mendukung terciptanya tata kelola keuangan negara yang efektif dan efisien.

D.3 Peningkatan Sarana Prasarana Kantor

Kanwil DJKN Kalimantan Barat terus berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang optimal. Salah satu inovasi kami adalah program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor, yang dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman, produktif, dan modern.

Melalui pembaruan fasilitas kerja, optimalisasi ruang pelayanan, dan integrasi teknologi terkini, kami memastikan bahwa setiap pegawai dan masyarakat yang berinteraksi dengan Kanwil DJKN mendapatkan pengalaman yang lebih baik.

D.4 Publikasi

Publikasi senantiasa dilakukan oleh Kanwil DJKN Kalimantan Barat melalui media sosial, website, media massa lokal Pontianak Post, acara Bincang di TVRI Stasiun Kalimantan Barat, RRI dan aktif menyampaikan opini yang diterbitkan melalui website DJKN dan harian Pontianak Post.

D.5 Buku Profil Kanwil DJKN Kalimantan Barat

Disusunnya buku profil Kanwil DJKN Kalimantan Barat ditujukan untuk menjadi panduan bagi *stakeholders* agar lebih mengenal Kanwil DJKN Kalimantan Barat baik mengenai layanan yang diberikan serta jangka waktu penyelesaian sesuai SOP, tugas dan fungsinya, struktur organisasi, wilayah kerja, dan pejabat dan pegawai pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat.



Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kanwil DJKN Kalimantan Barat

BAB IV PENUTUP



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Kanwil Wilayah DJKN Kalimantan Barat serta upaya peningkatan *good governance* yang mengacu pada rencana strategis tahun 2020-2024.

Penetapan indikator kinerja merupakan salah satu alat/*tools* dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pengukuran kinerja sasaran didasari atas penilaian pada Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada awal tahun 2024 telah ditetapkan 10 Sasaran Strategis (SS) yang dijabarkan dalam 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Penetapan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama tersebut dituangkan dalam Kontrak Kinerja Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat tahun 2024 yang juga merupakan turunan dari IKU Kemenkeu *One*.

Pencapaian kinerja merupakan perwujudan sinergi seluruh jajaran Kanwil DJKN Kalimantan Barat dalam menjalankan tugas sebagai Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang menghadapi tantangan di tahun 2024 dan hasil kinerja tahun 2024 tercermin dalam capaian Nilai Kinerja Organisasi Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat tahun 2024 sebesar 116,41%.

Kondisi perekonomian yang sangat fluktuatif di tengah ketidakpastian global, perkembangan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang makin tinggi atas kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, Piutang Negara, dan Lelang harus dijawab dengan inovasi, perbaikan proses bisnis dan peningkatan pelayanan. Namun demikian, seluruh insan pegawai Kanwil DJKN Kalimantan senantiasa berusaha menjadikan setiap kendala atau tantangan menjadi peluang dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Pencapaian pelaksanaan kinerja Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat pada tahun 2024 secara umum dapat dikatakan sangat baik dan dari target 20 IKU semuanya berhasil hijau.



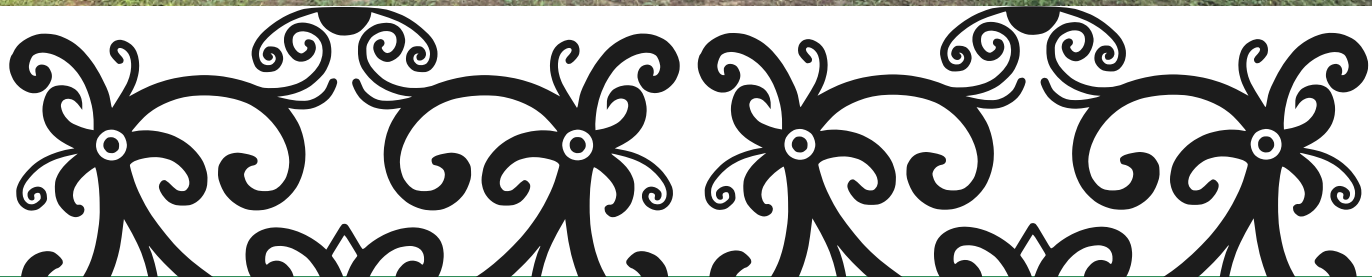
Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan komprehensif kepada seluruh pihak yang terkait atas capaian kinerja dan strategi Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat, sehingga dapat berguna dalam rangka peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Secara internal Laporan Kinerja ini juga dapat dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan secara eksternal Laporan Kinerja ini harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga pada akhirnya Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat dapat meningkatkan kinerjanya dan semakin dirasakan perannya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan yang terbaik.



Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kanwil DJKN Kalimantan Barat

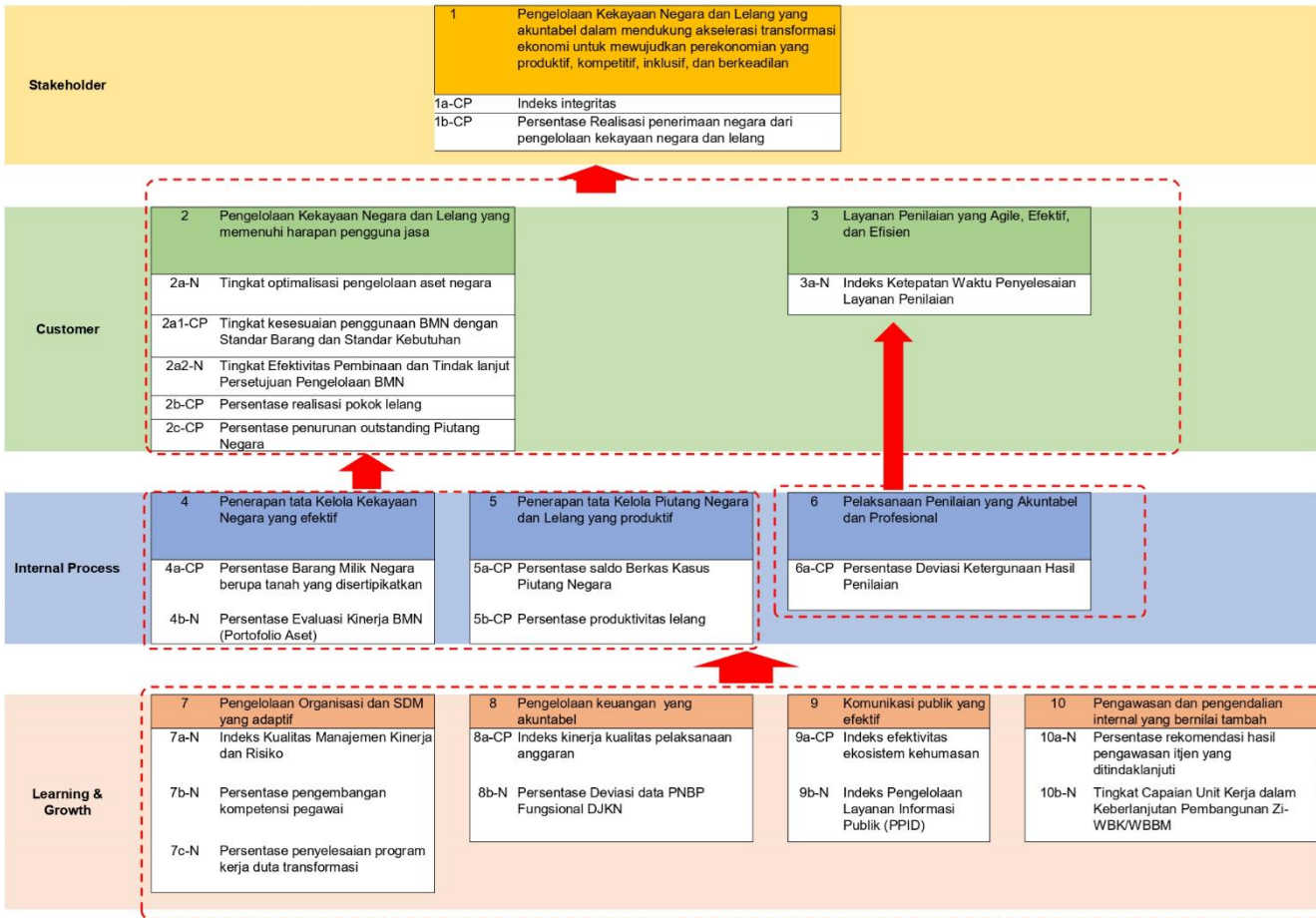
LAMPIRAN





**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-23/KN/2024
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA KALIMANTAN BARAT
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN BARAT
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
	Stakeholder Perspective			
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1a-CP	Indeks Integritas	89,17
		1b-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100% (Rp37 M)
	Customer Perspective			
2.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa	2a-N	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	100%
		2a1-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5%
		2a2-N	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%
		2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100% (Rp358 M)
		2c-CP	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100% (2 M)
3.	Layanan penilaian yang agile, efektif, dan efisien	3a-N	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
	Internal Process Perspective			
4.	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%
		4b-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
5.	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif	5a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	67,95% (106 BKPN)
		5b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	89%
6.	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional	6a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%
	Learning and Growth Perspective			
7.	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	7a-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85
		7b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		7c-N	Persentase Penyelesaian Program Kerja Duta Transformasi	75%
8.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%
		8b-N	Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10%
9.	Komunikasi publik yang efektif	9-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55
		9b-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
10.	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	10a-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti	98%
		10b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja Dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100%

Kegiatan

Anggaran

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

Rp 787.354.000

1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi

Rp Rp52.284.000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko

Rp 215.770.000
3. Pengelolaan Aset

Rp 514.280.000
4. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif

Rp 5.020.000

Dukungan Manajemen

Rp 5.712.338.000

1. Legislasi dan Litigasi

Rp 30.160.000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum

Rp 5.628.890.000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik

Rp 37.968.000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal

Rp 15.320.000

Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Kalimantan Barat



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban



Ditandatangani Secara Elektronik
Tetik Fajar Ruwandari



RINCIAN TARGET KINERJA

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KALIMANTAN BARAT

KEMENTERIAN KEUANGAN

TAHUN 2024

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
1a-CP	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
1b-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa							
2a-N	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2a1-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	60%	60%	71,5%	71,5%
2a2-N	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45%	45%	-	-	86,5%	86,5%
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2c-CP	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Layanan penilaian yang agile, efektif, dan efisien							
3a-N	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
4	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah Yang Disertipkatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
5	Penerapan tata kelola piutang dan lelang yang produktif							
5a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96%	90%	90%	81%	81%	67,95%	67,95%
5b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%
6	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional							
6a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							
7a-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85
7b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
7c-N	Persentase Penyelesaian Program Kerja Duta Transformasi	-	-	-	-	-	75%	75%
8	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8b-N	Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
9	Komunikasi publik yang efektif							
9a-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
9b-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
10	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							
10a-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti	35%	40%	40%	60%	60%	98%	98%
10b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja Dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100%	100%

Pejabat/Pegawai/PNS yang
dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Tetik Fajar Ruwandari



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KANWIL DJKN KALIMANTAN BARAT

PERIODE PENILAIAN: 01 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	Tetik Fajar Ruwandari	1	NAMA	Rionald Silaban
2	NIP	197608221995032001	2	NIP	19660423 199010 1 001
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Utama, IV/e
4	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat	4	JABATAN	Direktur Jenderal Kekayaan Negara
5	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat	5	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

HASIL KERJA

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU		TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
A. UTAMA					
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	Indeks Integritas		89,17	Penerima Layanan
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang		100%	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara		100%	Penerima Layanan
		Sub-IKI 1	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN Dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5%	Penerima Layanan
		Sub-IKI 2	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%	Penerima Layanan

HASIL KERJA				
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	Penerima Layanan
		Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%	Penerima Layanan
3	Layanan penilaian yang agile, efektif, dan efisien	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	Penerima Layanan
4	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah Yang Disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	Proses Bisnis
5	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	67,95	Proses Bisnis
		Persentase Produktivitas Lelang	89%	Proses Bisnis
6	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	Proses Bisnis
7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Penyelesaian Program Kerja Duta Transformasi	75%	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%	Penguatan Internal atau Anggaran

HASIL KERJA				
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Komunikasi publik yang efektif	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
10	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti	98%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Tingkat Capaian Unit Kerja Dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				
PERILAKU KERJA*				
1	Berorientasi pelayanan			
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.	
2	Akuntabel			
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.	
3	Kompeten			
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara	

PERILAKU KERJA*		
	- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan Negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Pegawai yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Tetik Fajar Ruwandari
NIP 19760822 199503 2 001

Jakarta, 30 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban
NIP 19660423 199010 1 001

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KANWIL DJKN KALIMANTAN BARAT

PERIODE PENILAIAN:

1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1.	44 pegawai pada unit Kanwil DJKN Kalimantan Barat
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN	

1. Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
2	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN Dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	60%	60%	71,5%	71,5%
5	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan pengelolaan BMN	-	45%	45%	-	-	86,5%	86,5%
6	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
9	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
10	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%
11	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96%	90%	90%	81%	81%	67,95%	67,95%
12	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%
13	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
14	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85
15	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
16	Persentase Penyelesaian Program Kerja Duta Transformasi	-	-	-	-	-	75%	75%
17	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Persentase Deviasi Data PNBPNBP Fungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
19	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
20	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
21	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti	35%	40%	40%	60%	60%	98%	98%
22	Tingkat Capaian Unit Kerja Dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100%	100%

KONSEKUENSI	
1.	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.
2.	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pegawai yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Tetik Fajar Ruwandari
NIP 19760822 199503 2 001

Jakarta, 30 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban
NIP 19660423 199010 1 001





**PIAGAM MANAJEMEN RISIKO
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN BARAT
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024
NOMOR: 23/KN/2024**

Dalam rangka pencapaian sasaran organisasi pada Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat, saya menyatakan bahwa:

1. Perumusan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi Risiko telah dilaksanakan sesuai ketentuan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Rencana mitigasi Risiko yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin.
3. Pemantauan dan *review* akan dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko.

Jakarta, 30 Januari 2024
Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat



Ditandatangani Secara Elektronik
Tetik Fajar Ruwandari



DAFTAR RISIKO
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2024

No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
			Awal Periode	Residual Harapan
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1.1 Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum.	22	17
		1.2 Loyalitas Pegawai yang rendah terhadap organisasi	15	10
		1.3 Adanya pelaksanaan pemanfaatan BMN K/L yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	9	6
2.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa	2.1 Optimalisasi penggunaan BMN <i>Underutilized</i> Tidak Terlaksana Sesuai Rencana	14	13
		2.2 Adanya Pembatalan Lelang	16	11
		2.3 Terdapat lelang yang laku dengan nilai lebih dari Rp2.000.000.000.	11	11
		2.4 Piutang Negara yang di setor rendah	14	11
3.	Layanan penilaian yang agile, efektif, dan efisien	3.1 Pemohon penilaian tidak dapat mendampingi penilai pada saat survei lapangan.	19	9
4.	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif	4.1 BMN Berupa Tanah Tidak Dilengkapi Dokumen Kepemilikan (Sertipikat Hak Pakai)	14	13
		4.2 Kuasa Pengguna Barang tidak melaksanakan rekomendasi portofolio aset.	8	6
5.	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif	5.1 Rendahnya Pelunasan Berkas Kasus Piutang Negara	22	14
		5.2 Pembagian lelang dan jenis lelang yang tidak merata.	14	9
6.	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan professional	6.1 Adanya perbedaan nilai Antara permohonan dan dengan nilai wajar BMN dalam rangka penilaian untuk tujuan pemindahtanganan/pemanfaatan.	10	5
7.	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	7.1 Adanya keterlambatan penyampaian Laporan Capaian Kinerja dan Manajemen Risiko.	10	5
		7.2 Adanya pegawai yang belum mengikuti pelatihan/diklat/PJJ/Elearning.	10	5

		7.3	Terdapat program kegiatan duta transformasi yang tidak dianggarkan.	14	9
8.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	8.1	Ketidaksesuaian Antara Pengelolaan kinerja dengan RKA-KL dan dokumen perencanaan lainnya	3	3
		8.2	Adanya perbedaan pencatatan antara penerimaan PNBP diaplikasi OMSPAN dengan Dropbox lelang.	11	6
9.	Komunikasi publik yang efektif	9.1	Persepsi negatif masyarakat atas pemberitaan di media massa dan media sosial.	22	19
		9.2	Ketidaktepatan Waktu Tindak Lanjut Permintaan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana DJKN	20	15
10.	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	10.1	Terdapat temuan ltjen pada tahun berjalan yang tidak dapat diselesaikan di tahun bersangkutan	2	2
		10.2	Terdapat perbedaaan persepsi terkait dokumen yang diupload di aplikasi DIA.	18	15

Jakarta, 30 Januari 2024
Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat



Ditandatangani Secara Elektronik
Tetik Fajar Ruwandari



ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: 23B/KN/2024

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-23/KN/2024 tanggal 30 Januari 2024, yang telah diubah sesuai dokumen adendum Perjanjian Kinerja Nomor: PK-23A/KN/2024 tanggal 31 Mei 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Semula			Menjadi		
			Indikator Kinerja	Target		Indikator Kinerja	Target
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa	2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100 (Rp358 M)	2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100 (Rp715 M)

Menyetujui,
Direktur Jenderal Kekayaan Negara,



Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban

Jakarta, 20 November 2024
Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat



Ditandatangani secara elektronik
Tetik Fajar Ruwandari



ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat tanggal 30 Januari 2024 yang telah diubah sesuai dokumen adendum Sasaran Kinerja Pegawai tanggal 31 Mei 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Semula				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa	Persentase realisasi pokok lelang	100 (Rp358 M)	Penerima Layanan
Menjadi				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa	Persentase realisasi pokok lelang	100 (Rp715 M)	Penerima Layanan

Jakarta, 20 November 2024

Pejabat yang dinilai,

Pejabat penilai kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Tetik Fajar Ruwandari



Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban



ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: 19 A/KN/2024

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-19/KN/2024 tanggal 30 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Semula			Menjadi		
		Indikator Kinerja		Target	Indikator Kinerja		Target
8.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%	8a-CP	Indeks Kinerja Anggaran	100%

B. Perubahan Rincian Target Kinerja

Sebelum									Menjadi								
Kode IKU	Indikator Kinerja Indvidu	Target							Kode IKU	Indikator Kinerja Indvidu	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17	1a-CP	Indeks Integritas	10	20	20	30	30	89,17	89,17
2a1-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan	-	50%	50%	60%	60%	71,5%	71,5%	2a1-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan	30%	50%	50%	60%	60%	71,5%	71,5%

[illegible]

Jakarta, 31 Mei 2024

Menyetujui,
Direktur Jenderal Kekayaan Negara,

Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat



Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban



Ditandatangani secara elektronik
Tetik Fajar Ruwandari



ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat tanggal 30 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Semula				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
8	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
Menjadi				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
8	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks Kinerja Anggaran	100%	Penguatan Internal atau Anggaran

B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

Sebelum									Menjadi								
No.	Indikator Kinerja Individu	Target							No.	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1.	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17	1.	Indeks Integritas	10	20	20	30	30	89,17	89,17

[illegible]

Sebelum									Menjadi								
No.	Indikator Kinerja Individu	Target							No.	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
	Dalam Keberlanjutan Pembangunan ZIWBK/WBBM									Dalam Keberlanjutan Pembangunan ZIWBK/WBBM							

Jakarta, 31 Mei 2024

Pejabat yang dinilai,

Pejabat penilai kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Tetik Fajar Ruwandari



Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban

